

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muslim Aid adalah salah satu *Non-Governmental Organization (NGO)* yang bergerak di bidang bantuan kemanusiaan Internasional dan berpusat di Inggris. Muslim Aid memiliki banyak cabang di berbagai negara, termasuk Indonesia. NGO ini memberikan bantuan kepada orang-orang yang menjadi korban bencana alam atau konflik atau menderita kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, diskriminasi, tunawisma, utang, pengangguran, maupun ketidakadilan. Muslim Aid didirikan di Inggris pada tahun 1985. Muslim Aid Indonesia (MAI) telah aktif di Indonesia sejak 2005, awalnya sebagai tanggap darurat terhadap gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Bantuan Muslim Aid berupa pengentasan kemiskinan dengan memberi perhatian pada pendidikan, pelatihan keahlian, penggunaan air bersih, perawatan kesehatan dan juga proyek-proyek peningkatan pendapatan. Muslim Aid juga telah membuka cabang-cabangnya. Antara lain; di Aceh, Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Jakarta. (Muslim Aid, 2017)

Muslim Aid merupakan lembaga bantuan sebagai proyek kerjasama antara Muslim Aid Inggris dan Muslim Aid Australia yang tetap berkomitmen membantu Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh H. Hamid Azad, *Head of Overseas Programs*. Menurut Hamid Azad, selama kunjungannya ke Indonesia, ia mengatakan bahwa bantuan di Indonesia ini akan bersifat jangka panjang. Muslim Aid terlibat dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca tsunami dan Yogyakarta pasca gempa dengan menyediakan dan menolong para korban hunian sementara (*temporary shelter*), rumah permanen, dan berbagai macam bantuan kemanusiaan lainnya. Kedatangan utusan Muslim Aid dari Inggris di Sabang dalam rangka menghadiri upacara penyelesaian pembuatan sebanyak 92 rumah, dengan total bantuan sebesar 5,75 milyar Rupiah yang dilaksanakan di desa Sukakarya. (Sadzali, 2007) Dan pada tahun 2013, Muslim Aid memenangkan International Charity of the Year. (Muslim Aid, 2017)

Penulis meneliti NGO Muslim Aid karena Muslim Aid ini memiliki cakupan yang lebih luas dibanding NGO lain. Muslim Aid memiliki 70 cabang di berbagai negara dibandingkan dengan NGO lain misalnya Islamic Relief Worldwide yang masih memiliki cabang di 40 negara (Islamic Relief Worldwide, 2019). Muslim Aid dan Islamic Relief Worldwide berdiri tahun 1980-an akan tetapi kiprah Muslim Aid jauh lebih luas dibandingkan dengan Islamic Relief Worldwide. Berdirinya organisasi ini tidak berjalan lancar, biasanya dalam membangun suatu badan kemanusiaan, masalah yang dihadapi adalah masalah finansial. Akan tetapi semakin berjalannya waktu, semakin banyak pula donatur yang mempercayakan donasinya kepada Muslim Aid. Dengan berbagai permasalahan yang timbul tersebut, pemerintah dan masyarakat tidak mampu mengatasinya sendiri. Oleh karena itu, peran *Non-Governmental Organisation* –salah satunya– Muslim Aid sangat dibutuhkan dalam menangani kemiskinan di Indonesia.

Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Kemudian, dilihat dari jumlah penduduknya, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Berdasarkan data tahun 2010, jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21 persen) (Badan Pusat Statistik, 2010). Walaupun Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar, akan tetapi masih banyak kemiskinan yang ada di Indonesia. Mengulas sedikit tentang masalah kemiskinan lebih dalam, BPS melansir bahwa garis kemiskinan di Indonesia selama Maret 2016-September 2016, meningkat sekitar 2,15 persen, yaitu dari Rp 354.386 per kapita per bulan pada Maret 2016 menjadi Rp 361.990 per kapita per bulan pada September 2016 (Fauzie, 2017). Kemudian pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). (Badan Pusat Statistik, 2018)

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017. Selama periode Maret 2017-September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 401,28 ribu orang (dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017) (Tabel 1.1), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 786,95 ribu orang (dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017). Yang mana peranan komoditi

makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2017 tercatat sebesar 73,35 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2017 yaitu sebesar 73,31 persen (Badan Pusat Statistik, 2018).

Gambar 1.1 Profil Kemiskinan di Indonesia September 2017



Sumber: Berita Resmi Statistik No. 05/01/Th. XXI, 2 Januari 2018
<https://www.bps.go.id/website/images/BRS-KEMISKINAN-JAN-2018-ind.jpg>

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, September 2017 (juta jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/website/images/BRS-KEMISKINAN-JAN-2018-ind.jpg>

Data di atas menunjukkan bahwa kemiskinan yang terbanyak ada di Pulau Jawa, dengan jumlah sebanyak 7,17 juta jiwa. Tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 34 propinsi di Indonesia, DIY ada di urutan ke-24 alias nomor 10 dari bawah (Saptopo, 2016). Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2017 sebesar Rp 374.009,- per kapita per bulan. Sementara garis kemiskinan pada Maret 2016 sebesar Rp 354.084,- per kapita per bulan, atau garis kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 5,63 persen. Bila dibandingkan kondisi September 2016 yang sebesar Rp 360.169,- per kapita per bulan maka dalam kurun satu semester terjadi kenaikan sebesar 3,84 persen. Jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, pada Maret 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 488,53 ribu orang. Bila dibandingkan dengan keadaan Maret 2016 yang jumlah penduduk miskinnya mencapai 494,94 ribu orang, maka selama satu tahun terjadi penurunan sebesar 6,41 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik, 2017).

Di Yogyakarta, tidak hanya masalah kemiskinan yang tinggi, akan tetapi potensi bencana alam di Yogyakarta pun relatif tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengingatkan masyarakat bahwa wilayah setempat memiliki 12 potensi ancaman bencana alam sehingga dibutuhkan kesiapsiagaan mereka (Seruji, 2017). Kemudian dalam masalah air, masyarakat Yogyakarta masih banyak mengalami kekurangan air bersih. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), selain di Gunung Kidul, daerah lainnya di **Yogyakarta** yang terancam mengalami krisis **air bersih** yaitu, Bantul sebanyak 7.135 jiwa dan Kabupaten Kulon Progo ada 12.721 jiwa (Trubus.id, 2017).

Berikutnya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan menjadi motor utama penopang pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi. Pada kuartal III 2016 persentase sumbangan provinsi ini mencapai 50,8 persen. Angka ini menjadi yang terbesar dibanding Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara yang masing-masing hanya 14,9 dan 12,9 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan kuartal III tercatat Rp 101 triliun. Sumbangan tertinggi berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor lain yang turut memberikan andil besar terhadap PDRB daerah adalah sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, sektor manufaktur dan sektor konstruksi (Badan Pusat Statistik).

Meskipun Indonesia memiliki sekitar 74 ribu desa, dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 18% atau 18.126 desa masuk dalam kategori desa tertinggal, terbanyak di kawasan Indonesia timur. Disebut tertinggal karena desa tersebut kurang berkembang dalam aspek ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas, dan faktor karakteristik daerah. Ketertinggalan tersebut membuat angka kemiskinan di daerah-daerah tersebut tinggi.

Berdasarkan paparan Bappenas, secara umum jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan sejak 2007 hingga 2018. Selama periode Maret 2017 – Maret 2018, tingkat kemiskinan menurun di semua provinsi kecuali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Papua yang justru mengalami kenaikan. Papua merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi, yakni mencapai 27,74%, artinya lebih dari seperempat populasi di provinsi tersebut masuk kategori miskin. Angka kemiskinan provinsi paling timur Indonesia tersebut 17,92 poin persen di atas angka kemiskinan nasional 9,82% dan 24,17 poin persen di atas angka kemiskinan DKI Jakarta 3,15%. Terlihat perbedaan mencolok atau disparitas angka kemiskinan antara Papua dan DKI Jakarta (Badan Pusat Statistik, 2018).

Persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2018 turun menjadi 9,82% dibanding posisi September 2017 sebesar 10,12% maupun Maret 2017 sebesar 10,64%. Namun, sebanyak 16 provinsi angka kemiskinannya masih di atas 10% dan juga di atas angka kemiskinan nasional. Sisanya, 18 provinsi persentase kemiskinannya di bawah angka kemiskinan nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Papua merupakan provinsi dengan penduduk miskin terbesar, yakni mencapai 917.630 ribu jiwa atau sekitar 27,74% total populasi. Artinya lebih dari seperempat penduduk Papua hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, angka kemiskinan tersebut mengalami penurunan dibanding posisi September 2017 yang mencapai 27,76%. Di urutan kedua, Papua Barat dengan persentase penduduk miskin mencapai 23,01% dan Nusa Tenggara Timur sebesar 21,35% di posisi ketiga. Meskipun masih tinggi, namun angka kemiskinan di tiga provinsi tersebut mengalami penurunan pada Maret 2018 dibanding posisi September 2017. Guna meningkatkan pemerataan serta mengentaskan kemiskinan pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, termasuk di Indonesia bagian timur. Pembangunan yang sebelumnya terkonsentrasi di Indonesia barat kini aktivitas pembangunan dapat dilihat di seluruh nusantara. Namun, hasilnya belum

terlihat karena *multiplier effect* dari pembangunan infrastruktur biasanya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang (Badan Pusat Statistik, 2018).

Pembangunan yang dilakukan pemerintah seiring tumbuhnya ekonomi sekitar 5% mampu menekan angka kemiskinan. Namun, turunnya kemiskinan tersebut belum mampu menurunkan ketimpangan pengeluaran antara masyarakat miskin dengan yang kaya secara maksimal. Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 turun menjadi 25,95 juta jiwa atau sekitar 9,82% dari total populasi. Dari grafik di bawah ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan mengalami tren penurunan sejak krisis moneter 1998 dan mencapai level terendahnya hingga di bawah 10% untuk pertama kalinya. Namun, turunnya kemiskinan dianggap semu oleh beberapa kalangan karena ditopang oleh kucuran bantuan sosial dan bukan karena perbaikan secara struktural. Berkurangnya penduduk miskin selama ini belum mampu menekan gap antara si miskin dan si kaya secara signifikan. Data BPS menunjukkan indikator kesenjangan (rasio Gini) pada Maret 2018 sebesar 0,389. Meskipun turun dibanding posisi September dan Maret 2017, ketimpangan pengeluaran masyarakat tersebut masih jauh di atas saat terjadi krisis yang berada di level 0,308. (Baca Databoks: Berkurang 633 Ribu, Penduduk Miskin Indonesia Catat Rekor Terendah Sejak 1998) (Badan Pusat Statistik, 2018).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten kota di Indonesia pada 2016, rata-rata sebesar Rp 45,9 juta per kapita per tahun. Dari total 484 kabupaten kota yang berhasil didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 45 persen di antaranya kabupaten/kota berada di rentang antara Rp 25 juta - Rp 50 juta per kapita/tahun. Selebihnya, hanya sedikit kabupaten yang mencatatkan pendapatan per kapita di atas Rp 150 juta per kapita/tahun. Adapun jumlah kabupaten/kota dengan pendapatan per kapita di atas Rp 200 juta hanya terdapat di 13 daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah. Nominal PDRB bila dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah akan menghasilkan PDRB per kapita. Hasil perhitungan ini digunakan sebagai pendekatan untuk menghitung pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah (Badan Pusat Statistik).

B. Rumusan Masalah

Dari fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: **“Bagaimana peran Organisasi Kemanusiaan Muslim Aid dalam menangani kemiskinan di Indonesia?”**

C. Konsep Pemikiran

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif, maka konsep dirasa cukup untuk menjadi alat dalam menjawab rumusan masalah diatas. Maka akan digunakan konsep *non-governmental organization* yang tergolong ke dalam NGO yang berbasis bantuan kemanusiaan dan konsep *humanitarian assistance*.

1. Non-Governmental Organization

a. Definisi Non-Governmental Organization

Non-Governmental Organization adalah organisasi yang bersifat privat dan *non-profit* (tidak ada keuntungan materiil) yang terlibat dalam aktivitas internasional. Mereka memiliki orientasi pada satu isu ataupun bisa saja dengan berbagai orientasi isu. Mereka pun juga dapat menekan pemerintah dan organisasi-organisasi internasional lainnya dengan secara langsung dan tidak langsung dengan teknik lobi (Pease, 2010). NGO atau yang dikenal dengan LSM juga menggagas ide-ide, menyediakan informasi, dan mempengaruhi (*lobbying*) untuk mengadakan sebuah perubahan kebijakan. David Lewis mendefinisikan sebuah NGO sebagai sebuah “*voluntary associations*” yang memiliki kepedulian untuk merubah sebuah lingkungan tertentu dalam konteks yang lebih baik. (Lewis, 2001, hal. 30)

NGO sudah tumbuh dengan sangat pesat dan kuat. Bahkan kelompok non-profit ini dapat melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai kalangan. NGO ini merupakan sebuah organisasi yang sistem keanggotaannya tidak melibatkan negara, melainkan melibatkan minimal dua kelompok tertentu dari negara yang berbeda, tetapi memiliki keinginan dan tujuan yang sama. (Archer, 2001, hal. 38) Jika dibandingkan dengan *International Government Organization* (IGO), NGO merupakan sebuah organisasi yang tidak cukup banyak memiliki nilai kekayaan, namun organisasi ini memiliki kemampuan dalam mengembangkan sistem sosialisasi kedalam lingkup masyarakat. NGO biasanya memiliki kemampuan lebih untuk dapat mendekati masyarakat agar masyarakat yang bersangkutan dapat menerima pemikiran yang organisasi tersebut miliki. Sebuah organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional non pemerintah (INGO) jika memenuhi beberapa point penting, yaitu tidak mengandung unsur keterlibatan pemerintahan negara

yang bersangkutan, memiliki tujuan global atau menyangkut lingkup hubungan internasional yang luas, memiliki sifat keanggotaan yang terbuka baik dalam melakukan rekrutmen maupun dalam menjalin hubungan kerjasama dengan kelompok maupun organisasi lainnya, memiliki sistem kepemimpinan yang dirancang secara berkala, serta dana mobilitas organisasi berasal dari minimal tiga negara. (McLellan, 1977, hal. 16)

Istilah NGO sendiri tidak beredar secara umum sebelum dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi NGO baru menjadi populer sejak 1970-an hingga sekarang. Sangat jelas sekali, NGO haruslah berdiri secara independen dari berbagai campur tangan langsung pemerintah. NGO juga bukan bagian dari birokrasi pemerintah, partai, perusahaan, organisasi kriminal atau kelompok gerilya. Menurut Professor Peter Willets,

“NGO is defined as an independent voluntary association of people acting together on a continuous basis, for some common purpose, other than achieving government office, making money or illegal activities.” (Willets, 2011) (NGO didefinisikan sebagai asosiasi sukarela yang independen yang terdiri dari orang-orang bekerja bersama-sama pada landasan yang berkelanjutan, untuk beberapa tujuan yang sama, dan bukan seperti pencapaian pemerintah, ataupun yang menghasilkan uang atau aktivitas ilegal).

NGO pada perkembangannya memiliki definisi yang berbeda. Dahulunya studi NGO masih membahas NGO yang ada dalam tubuh PBB. Namun seiring berjalannya waktu, pertumbuhan NGO semakin besar dan semakin memunculkan arti lain di dalamnya. Sehingga secara struktur, NGO diklasifikasikan ke dalam lima level, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tingkatan NGO

Level of Organization	From 1945 to Early 1990s	Early 1990s Onwards
Local	National NGO, at the UN Not discussed elsewhere	Grassroots, community based or civil society organization, or local NGO
Provincial (USA-State)	National NGO, at the UN Not discussed elsewhere	Civil society organization or local NGO
National	National, NGO, at the UN NGI, outside the UN	NGO or national NGO or civil society organization
Regional	International NGO	NGO or civil society organization
Global	International NGO	NGO or Major Group or civil Society Organization

Sumber: Peter Willets dalam *What is a Non-Governmental Organization?*

b. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara.
2. Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba).
3. Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan oara anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Muslim Aid merupakan salah satu dari *Non-Governmental Organization* dapat melakukan peran *lobbying* terhadap pemerintah dengan cara melakukan MoU dengan pemerintah Indonesia. Awal Muslim Aid dapat masuk ke Indonesia yaitu dengan melalui proses-proses politik, dalam hal ini terlebih dahulu melalui proses pengurusan izin masuk ke Indonesia dengan birokrasi pemerintah Indonesia, dalam hal ini yang terlibat dengan aktor politik pemerintah Indonesia adalah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kemudian Muslim Aid melakukan kerjasamanya (bermitra) dengan Kementerian Sosial (Multilateral Kementerian Luar Negeri Direktorat Sosial Budaya dan

Organisasi Internasional Negara Berkembang, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa utusan pemerintah (aktor politik) juga dilibatkan. Dan Indonesia dapat dikatakan cukup terbuka di bidang politik karena menerima bantuan asing dari *International Non-Governmental Organization* yang salah satunya yaitu Muslim Aid. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama negara Indonesia dengan Muslim Aid termasuk salah satu hubungan politik Luar Negeri.

c. Pandangan NGO di dunia barat

Selanjutnya pandangan NGO di dunia barat, yang dibagi menjadi dua jenis :

1. NGO yang berorientasi pada aksi sebagai aksi atau program.

Jenis ini menjalankan program karena keprihatinan terhadap berbagai masalah yang muncul di masyarakat seperti isu hak asasi manusia, lingkungan hidup, perdamaian, keadilan, dan lain-lain.

2. NGO berfungsi sebagai lembaga donor.

Jenis lembaga ini khusus menyalurkan bantuan dana kepada NGO di dunia ketiga. Dalam fungsi ini perannya memberi bantuan kepada negara yang membutuhkan bantuan dana atau tenaga (Friska, 2012).

Dalam hal ini Muslim Aid termasuk dalam jenis NGO yang berorientasi pada aksi sebagai aksi atau program dalam perannya memberikan kontribusinya dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, serta melakukan upaya dalam hal pemberdayaan masyarakat yang berupa pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini Muslim Aid membawa jargon utamanya yaitu *Muslim Aid Serving Humanity*. Yang mana *Muslim Aid* ini menjalankan programnya karena keprihatinan terhadap berbagai masalah yang muncul di masyarakat. Yang pada awal kerjasamanya dengan Indonesia dilakukan karena keprihatinannya terhadap terjadinya bencana Tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004. (Muslim Aid, 2017)

2. Humanitarian Assistance

Bantuan yang diberikan kepada suatu negara untuk mengatasi masalah-masalah kemanusiaan. Bantuan dapat diberikan oleh negara atau organisasi internasional. Istilah *humanitarian assistance* adalah pemberian bahan makanan, obat-obatan, tenaga medis, dan rehabilitasi oleh sejumlah negara dan organisasi internasional kepada Indonesia untuk mengatasi dampak bencana alam tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. *Humanitarian assistance* umumnya diberikan tanpa adanya kewajiban bagi negara penerima bantuan untuk mengembalikan (Ashari, 2015).

Humanitarianism dalam *Journal of Humanitarian Assistance* didefinisikan sebagai kerja kemanusiaan yang berlaku lintas batas negara dengan tujuan menolong mereka yang membutuhkan. Melakukan sesuatu bagi korban bencana merupakan sebuah keharusan dan kewajiban moral. Bantuan kemanusiaan sendiri merupakan kegiatan memberikan sesuatu kepada korban bencana. Hak-hak dasar kemanusiaan yang sering kali hilang ketika terjadinya bencana menuntut adanya aksi-aksi kemanusiaan. Konsep *Humanitarianism* dapat dilihat dalam aplikasinya di dua kondisi yakni perang dan bencana alam (Srikandi, 2010). Meski pasca Perang Dunia II, bencana kemanusiaan akibat konflik semakin menurun, dipihak lain justru bencana kemanusiaan yang diakibatkan oleh bencana alam semakin meningkat dengan dampak yang luar biasa besar, terutama pasca dekade 1990an. Bencana banjir, badai, gempa bumi, tsunami dan gunung meletus banyak terjadi dan menelan kerugian cukup besar, baik kerugian jiwa maupun materil (USAID). Bantuan kemanusiaan dengan konsep humanitarian dalam konvensi Jenewa menekankan pada usaha untuk menghilangkan penderitaan manusia yang terjadi akibat krisis atau bencana. Prinsip tersebut merupakan komitmen paling utama dalam aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh berbagai aktor dalam aksi kemanusiaan. Kata “bencana” sendiri merupakan kata kunci bagi keterlibatan berbagai pihak dalam penanganannya (Bencana Ditinjau dari Aspek Pengetahuan dan Praktis, 2010).

Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan kesiapan berbagai pihak dalam penanggulangan pascabencana. Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, pemerintah nasional mempunyai tanggungjawab utama dalam penanggulangan bencana alam (Crisis Management on National and International Disaster Response). Namun selain negara, ditataran global, masalah aksi kemanusiaan diwarnai dengan kemunculan para aktor yang terdiri atas institusi negara, militer, keamanan, *Non-Governmental Organization* (NGO) baik ditingkat lokal maupun yang mengungus agama tertentu, hingga organisasi profesi (dokter) yang menjalankan misi

kemanusiaan ke seluruh dunia. Aksi Kemanusiaan mempunyai dua dimensi yang melekat satu sama lain yaitu perlindungan terhadap manusia dan pemberian bantuan. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/UNOCHA*), lebih lanjut menjelaskan prinsip-prinsip Humanitarian sebagai basis dari setiap *international humanitarian action*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain *Humanity, Neutrality, Impartiality* dan *Independence* (OCHA on Messages: Humanitarian Principles), yang merupakan gambaran dari Hukum Humaniter Internasional dan prinsip-prinsip dalam kerangka kerja yang dibangun oleh Komite Internasional untuk Palang Merah Dunia (*the International Committee of the Red Cross/ICRC*). Prinsip kemanusiaan merupakan komitmen paling dasar dari kerja kemanusiaan yang dilakukan para aktor dalam aksi kemanusiaan. Pemberian bantuan kemanusiaan sebagai bentuk dari respon kemanusiaan dalam penanggulangan bencana haruslah didasari oleh prinsip kemanusiaan tersebut. Untuk dapat melihat sejauh mana pemenuhan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam aksi-aksi kemanusiaan, berikut ini bentuk eksplorasi prinsip-prinsip Humanitarian tersebut.

Humanity, berarti aksi kemanusiaan mengutamakan penyelamatan kehidupan manusia dan menghilangkan penderitaan dimanapun bencana mungkin terjadi. Penderitaan yang dialami oleh korban harus diatasi ketika ditemukan, dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, para pengungsi, dan orang tua. Oleh karena itu, pada setiap aksi-aksi kemanusiaan, organisasi kemanusiaan memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan mempertahankan akses ke semua penduduk, khususnya bagi kelompok rentan. Prinsip ini merupakan komitmen paling mendasar dari para agensi kemanusiaan dalam aksi kemanusiaannya.

Selanjutnya *Impartiality* berarti implementasi dari aksi kemanusiaan yang dilakukan tanpa diskriminasi, dengan tidak mempertimbangkan kewarganegaraan, kesukuan, agama, jenis kelamin, maupun ras, saat menolong mereka yang membutuhkan. Aksi kemanusiaan harus dilakukan atas dasar kemandirian, serta memberikan prioritas kepada korban-korban dengan kondisi kritis. Bantuan kemanusiaan diharapkan dapat disuplai kepada mereka-mereka yang mendapatkan penderitaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Prinsip proporsionalitas dan prinsip nondiskriminasi diturunkan dari konsepsi HAM, sebagai dasar dan kerangka kerja untuk penilaian kebutuhan.

Berikutnya *Neutrality*, berarti aksi kemanusiaan harus tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam sebuah konflik bersenjata atau sengketa lainnya dimana aksi tersebut dilaksanakan. Agensi kemanusiaan tidak boleh berpihak dalam permusuhan atau terlibat dalam kontroversi yang bersifat politik, ras, agama atau ideologi. Prinsip tersebut mensyaratkan aksi kemanusiaan untuk tidak memihak salah satu pihak yang bertikai dalam konflik. Adanya transparansi dan keterbukaan menjadi prasyarat bagi netralitas aktor kemanusiaan. Prinsip netralitas dalam hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip HAM.

Terakhir *Independence*, berarti aksi kemanusiaan memiliki otonomi untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan dan terbebas dari tujuan politik, ekonomi, militer dan tujuan-tujuan lainnya. Pada umumnya pelaksanaan aksi kemanusiaan pasti melibatkan *stakeholder* yaitu penerima manfaat, otoritas nasional atau lokal, donor, dan lembaga bantuan. Dalam aksi kemanusiaannya, NGO bertindak secara otonom dan bertanggung jawab kepada penerima bantuan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan yang bersifat politis dari pendonor maupun otoritas yang ada.

Prinsip-prinsip humanitarian yang ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga kemanusiaan umumnya dijelaskan dengan definisi yang sangat umum. Bentuk operasionalisasi dari prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan agar dapat diaplikasikan dalam kajian-kajian ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam isu tata kelola bencana. Tata kelola bencana yang diterapkan oleh aktor-aktor kemanusiaan haruslah berlandas pada keempat prinsip-prinsip Humanitarian (Isu bencana dan prinsip-prinsip humanitarian dalam studi ilmu Hubungan Internasional, 2016).

D. Hipotesis

Dengan mengaitkan pokok permasalahan dengan konsep pemikiran, maka dapat terlihat adanya sebuah hubungan dari keduanya. Sehingga berdasarkan analisis gerak kerja Muslim Aid ini, penulis mengambil hipotesis yang dilakukan Muslim Aid dalam menangani isu kemiskinan di Indonesia dengan peran:

1. Muslim Aid melakukan MoU dengan pemerintah Indonesia.
2. Muslim Aid sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) yang bergerak di badan kemanusiaan (*Muslim Aid Serving Humanity*) melakukan peran sebagai *Humanitarian Assistance* berupa: memberi perhatian pada pendidikan, pelatihan keahlian, penggunaan air bersih, perawatan kesehatan, pengurangan risiko bencana, dan juga proyek-proyek peningkatan pendapatan.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir atau skripsi ini, terdapat beberapa tujuan yang penulis canangkan yaitu:

- 1) Mendeskripsikan gerak kerja Muslim Aid sebagai salah satu *International Non-Governmental Organization (INGO)*.
- 2) Mendeskripsikan kondisi masyarakat Indonesia dan potensi bencana alam di Indonesia.
- 3) Mengetahui bagaimana proses *lobbying Muslim Aid* sebagai NGO ketika masuk ke Indonesia dan mengetahui upaya-upaya bantuan kemanusiaan yang dilakukan NGO Muslim Aid dalam menangani kemiskinan di Indonesia.
- 4) Menerapkan konsepsi yang telah dipelajari mengenai *non-governmental organization, humanitarian assistance*, serta yang berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan.
- 5) Sebagai skripsi atau tugas akhir dalam menempuh Strata 1 (S1) Ilmu Hubungan Internasional

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini yaitu:

1) Bagi Mahasiswa

Mahasiswa mampu menerapkan berbagai konsep dan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan berlangsung di jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Kemudian dihubungkan dengan studi kasus yang terjadi sehingga memunculkan benang merah di dalamnya. Selain itu, mahasiswa mampu memahami salah satu NGO berbasis Muslim yang berpusat di Inggris dalam membantu masyarakat di dunia, yaitu Muslim Aid. Diharapkan juga agar mahasiswa memahami bagaimana peran NGO di bidang amal terutama dalam menangani isu kemiskinan di Indonesia.

2) Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat umum, khususnya masyarakat Indonesia, lebih menaruh perhatian terhadap isu-isu kemiskinan yang ada di Indonesia. Isu kemiskinan menjadi titik awal bagi masyarakat Indonesia untuk sama-sama berjuang dalam mengatasi masalah kemiskinan akibat rendahnya tingkat pendapatan maupun akibat dari bencana alam. Selain itu juga, diharapkan melalui penelitian ini dapat menggambarkan bahwa kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang penyelesaiannya tidak hanya melibatkan pemerintah sekitar, akan tetapi melibatkan pemerintah secara umum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga terwujudlah hubungan yang baik antar negara, antar suku bangsa, antar ras dan antar agama.

3) Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO)

Organisasi Muslim Aid kemudian diharapkan mampu menginspirasi atau setidaknya dapat diambil pelajaran, entah itu kelebihan ataupun kekurangannya, dalam pelaksanaan dan manajemen organisasinya dalam menyalurkan kepentingan-kepentingan terhadap pihak yang terkait melalui upaya kesejahteraan sosial dalam bidang amal bantuan kemanusiaan.

4) Bagi Negara

Diharapkan negara Indonesia atau negara yang memiliki kasus serupa, semakin menaruh perhatian terhadap hak-hak warga negaranya dan tidak memandang sebelah mata masalah sosial yang terjadi sehingga kemudian merambah ke ranah politik. Khususnya di negara Indonesia, kasus ini menjadi pengingat bahwa isu kemiskinan juga patut diperhatikan agar tidak semakin mengalami peningkatan secara terus-menerus. Sehingga diharapkan sebab-akibat yang terjadi dari isu kemiskinan ini bisa ditekan dan tidak menjadi efek domino bagi wilayah-wilayah lain.

G. Metode Penulisan

1) Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif yang di dalamnya akan menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

2) Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, Muslim Aid sebagai unit analisis (variabel dependen) dan isu kemiskinan masyarakat Yogyakarta sebagai unit eksplanasi (variabel independen). Sehingga tingkat analisisnya ialah tingkat kelompok individu (Morgan & Mas'ood). Sedangkan level analisis berada pada level reduksionis, yakni unit eksplanasi lebih rendah dibandingkan unit analisis.

3) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis riset deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data-data yang tersedia dalam obyek tersebut. Analisis isi deskriptif adalah analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu (Eriyanto).

4) Teknik Pengumpulan Data

Menilik jenis dan sifat penelitian menunjukkan bahwa karya ilmiah ini menggunakan metode Studi pustaka atau *Library research*, metode ini digunakan sebagai data sekunder untuk mempelajari sumber-sumber yang relevan dalam rangka menganalisis masalah secara sistematis dan obyektif. Maka dari itu, data yang berasal dari Studi pustaka diperlukan dan menjadi modal utama dalam penelitian ini. Sehingga akan menjadi sesuai jika yang menjadi rujukan ialah data sekunder.

Data sekunder disini berupa dokumen atau laporan atau artikel yang diunggah langsung oleh organisasi Muslim Aid dalam website resminya yang menjadi bahan utama dalam analisis isi. Data tambahan lainnya berupa buku, jurnal, artikel, koran online atau lainnya yang dianggap relevan. Hal ini agar sesuai dengan cakupan studi kasus yang diteliti serta untuk meningkatkan obyektifitas.

5) Jangkauan Penelitian

Jangkauan dari penelitian ini dibatasi pada bantuan kemanusiaan terhadap isu kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada peran organisasi *non-profit The Muslim Aid* sebagai aktor dalam menyelesaikan permasalahan isu kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini juga akan membahas mengenai bantuan-bantuan dari *Muslim Aid* yang pernah dilakukan di negara Indonesia secara umum. Mengingat Muslim Aid ini merupakan organisasi badan amal Muslim yang menangani bantuan kemanusiaan terbesar di negara pendirinya, yaitu United Kingdom, Inggris.

Jangka waktu obyek website resmi Muslim Aid yang diteliti dibatasi yakni tahun 2004 hingga tahun 2018. Kurun waktu sejak didirikannya Muslim Aid tahun 1985 belum terlalu menunjukkan signifikansi Muslim Aid dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Indonesia. Tetapi dengan terjadinya peristiwa Tsunami Aceh pada Desember 2004 menjadi tolak ukur kerja sama pertama Muslim Aid Inggris dengan Indonesia. Pembatasan waktu tersebut dianggap sebagai jangkauan yang tepat untuk penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara sistematis berdasarkan kaidah yang berlaku dalam penulisan ilmiah dibagi dalam beberapa bab dengan pembagian pembahasan dalam wilayahnya sendiri namun saling terkait satu sama lain. Dengan tujuan mempermudah dalam melakukan interpretasi terhadap topik persoalan, maka skripsi ini dibagi menjadi lima bagian. Yaitu:

Pada Bab I berisi pendahuluan akan diuraikan tentang latar belakang masalah yang pada bagian latar belakang masalah akan menjelaskan mengenai awal berdirinya Muslim Aid yang dilengkapi dengan data-data penduduk miskin di Indonesia dan beberapa wilayah di negara Indonesia pada khususnya. Kemudian yang terakhir adalah awal mulanya *Muslim Aid* bekerja sama dengan Indonesia dengan perannya di bidang bantuan kemanusiaan. Dilanjutkan dengan adanya tujuan penelitian, manfaat penelitian, pokok permasalahan, konsep pemikiran, hipotesis, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas tentang dinamika hubungan Muslim Aid dengan Indonesia. Berisi mengenai deskripsi dan pengukuran profil organisasi *the Muslim Aid* yang pada bab ini akan membahas tentang sejarah berdirinya *Muslim Aid* dari tahun 1985 hingga masuknya ke Indonesia pada tahun 2004. Kemudian akan membahas mengenai visi misi berdirinya organisasi ini dan keterlibatan Muslim Aid di beberapa negara.

Bab III akan membahas tentang bentuk permasalahan kemiskinan di Indonesia. Berisi penjabaran tentang berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia, yang akan menjelaskan mengenai beberapa penyebab kemiskinan di Indonesia beserta data-data kemiskinan dari tahun 2014 – 2018.

Bab IV akan menganalisis proses-proses Muslim Aid melakukan MoU dengan pemerintah Indonesia. Yang kemudian akan menjelaskan tentang peran badan amal organisasi Muslim Aid dalam menangani masalah isu kemiskinan. Berisi pemaparan tentang peran Muslim Aid sebagai lembaga bantuan amal internasional dalam menangani isu kemiskinan di Indonesia dalam hal pemberdayaan masyarakat yang berupa pengentasan kemiskinan dengan memberi perhatian pada pendidikan, pelatihan

keahlian, penggunaan air bersih, perawatan kesehatan, pengurangan risiko bencana, dan juga proyek-proyek peningkatan pendapatan.

Bab V berisi mengenai pemaparan rangkuman dan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya sebagai bentuk penegasan atas penelitian ini.